

Diskriminasi Buruh Perempuan: Studi tentang Identifikasi Jenis dan Faktor Penyebabnya di Pabrik Tempe Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir

Gunawansyah¹, Yunindyawati¹, Vieronica Varbi Sununianti¹

¹ Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Corresponding author: gunawansyah@gmail.com

Received : Januari 2020; Accepted; April 2020 ; Published : Mei 2020

Abstract

The study is about "Female Discrimination Of Labor Force In Tempe Factory Timbangan Village, Indralaya Subdistrict, Ogan Ilir Regency". The problem of this study where the kinds and factors which causing discrimination toward women labor and what if the action in this discrimination. This study was qualitative descriptive research with unit analysis was individual they were the owner of factory, men labor and women labor. To determine the informants, this study used purposive sampling with the total number was 18 persons, they were an owner, 12 men labor and 6 women labor. In collecting the data this study used observation non-participant, interview and documentation. Through six steps to analyze the data, the researcher started with describe all his experience, did research then interviewed the questions grouped in that units and wrote the explanation about his experience include the example of it, then the researcher reflected their opinion and used several imagination after that the researcher constructed all the explanation about essence, then processes were first step and next was followed by all participants. This study used triangulation method compared with other sources. The results of this study showed that kinds and factors that caused the discrimination there were discrimination salary because family factors. There was no pregnant leave and discrimination charge because charge factor and effort of women labor of these discrimination was by doing protest to the owner.
Keywords: discrimination, women Labor, determinants, female labour

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Diskriminasi Buruh Perempuan di Pabrik Tempe Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir" Permasalahan yang diangkat adalah apa jenis dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap buruh perempuan yang bekerja di pabrik dan bagaimana tindakan buruh perempuan terhadap diskriminasi yang dialaminya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan unit analisis adalah individu yaitu pemilik pabrik, buruh laki-laki, dan buruh perempuan. Penentuan informan dilakukan secara purposive (sengaja) dengan jumlah informan 18 orang terdiri dari 1 pemilik pabrik, 12 buruh laki-laki, dan 6 buruh perempuan. Data penelitian didapat melalui observasi non partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data analisis melalui enam tahapan yaitu peneliti mulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh pengalamannya, penelitian kemudian memaknakan pernyataan (dalam wawancara), pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan kedalam unit-unit tersebut dan menuliskan sebuah penjelasan teks tentang pengalamannya

termasuk contohnya secara seksama, peneliti kemudian merefleksikan pemikirannya dan menggunakan variasi imajinasi atau deskripsi struktural, peneliti kemudian mengkonstruksikan seluruh penjelasannya tentang makna dan esensi pengalamannya, proses tersebut merupakan langkah awal penelitian mengungkapkan pengalamannya dan kemudian diikuti pengalaman seluruh partisipan. Metode triangulasi dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya diskriminasi di pabrik tempe kelurahan Timbangan yaitu diskriminasi upah/gaji karena faktor kekeluargaan, diskriminasi tidak adanya cuti hamil dan melahirkan karena faktor biologis, dan diskriminasi penambahan beban kerja karena faktor beban kerja. Dan upaya buruh perempuan dalam menanggulangi diskriminasi yang dialaminya yaitu dengan melakukan protes terhadap pemilik pabrik.

Kata kunci: diskriminasi, buruh perempuan, determinan, perlawanan

PENDAHULUAN

Kaum perempuan hari ini tidak hanya beraktifitas di ranah domestik saja (Banjarani & Andreas, 2019; Devi & Pratami, 2018). Namun, di dalam masyarakat telah terjadi perubahan paradigma mengenai peran perempuan di ranah publik (Putri, ., & Pratiwi, 2019). Tidak dapat dipungkiri, bahwa gerakan sosial feminisme yang berkembang mulai abad ke-18 telah menjadi salah satu penanda terbukanya ruang publik bagi perempuan. Dimulai dengan munculnya gerakan feminisme liberal yang mengajukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan, yaitu menghentikan marginalisasi perempuan dengan memperjuangkan perubahan hukum dan peraturan yang memungkinkan bagi perempuan untuk memiliki akses dan control yang sama terhadap pekerjaan dan imbalan ekonomi (Sihombing, 2016).

Perbaikan nasib buruh perempuan Indonesia sering menimbulkan banyak kontroversial dan merupakan isu yang tak pernah habis untuk diperbincangkan. Ketika perempuan masuk di dunia kerja, sering mengalami pola diskriminasi dan peminggiran yang didasari pada keyakinan dan perilaku yang menetapkan perempuan dalam posisi lebih rendah dibanding buruh laki-laki (Jodkowska, 2013; Robinson & Wunnava, 1989). Nasib buruh perempuan Indonesia bergantung kepada kepedulian pemerintah untuk lebih serius memikirkan serta memberi perlindungan terhadap warganya (Jones, 1986; Nguyen, 2019). Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan Indonesia hingga saat ini merupakan bukti nyata bahwa kurang terlindunginya hak-hak buruh perempuan di Indonesia. Kurangnya perhatian dan pengawasan pemerintah terhadap para buruh perempuan sering kali memicu terjadinya diskriminasi yang dialami oleh para buruh perempuan. Ini bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi ataupun sanksi yang tegas terhadap orang-orang yang melakukan praktek-praktek diskriminasi terhadap para buruh perempuan ini (Cameron, Suarez, & Rowell, 2019; Platt, 2018).

Dalam penelitian ini peneliti menjadikan pabrik pembuatan tempe Kelurahan Timbangan, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir sebagai objek penelitian karena peneliti rasa di pabrik pembuatan tempe ini telah terjadi praktek-praktek diskriminasi yang dilakukan oknum pemilik pabrik. Karena dari observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa praktek diskriminasi yaitu perbedaan upah/gaji antara buruh pria dan buruh wanita. Belum lagi permasalahan tidak adanya cuti yang diberikan pihak pabrik kepada para buruh yang bekerja. Seperti yang telah diketahui bahwa kebutuhan antara pria dan perempuan itu berbeda, buruh perempuan membutuhkan cuti hamil belum lagi setelah melahirkan, dan bahkan pemerintah juga sudah mengatur cuti apabila buruh perempuan tersebut mengalami haid dalam Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 81 mengatur bahwa pekerja perempuan yang sedang menstruasi diizinkan tidak bekerja pada hari pertama dan kedua dan wajib memberitahukannya kepada manajemen perusahaan (Magnani & Rammohan, 2009).

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di pabrik pembuatan tempe tersebut terdapat delapan belas buruh yang bekerja di pabrik pembuatan tempe kelurahan Timbangan ini, terdiri dari dua belas buruh pria dan enam buruh perempuan. Di pabrik pembuatan tempe kelurahan Timbangan terdapat perbedaan gaji/upah dari para buruh yang bekerja disana, buruh pria digaji sebesar Rp. 2.000.000 per bulan, sedangkan gaji buruh perempuan hanya berkisar Rp 800.000 – Rp 1.300.000 per bulan. Dari observasi awal peneliti menemukan bahwa adanya hubungan kekeluargaan dari para buruh pria dengan pemilik pabrik tersebut. Buruh pria yang bekerja di pabrik tempe kelurahan Timbangan ini semuanya bukan berasal dari Sumatera Selatan melainkan berasal dari Jawa. Selain masalah upah dan gaji tadi, terdapat juga masalah yang lain yaitu tidak adanya kebijakan tentang cuti hamil dan melahirkan yang dibuat pihak pabrik terhadap buruh perempuan yang bekerja, buruh perempuan yang tidak bekerja akan mendapatkan sanksi dari pihak pabrik yaitu berupa pemotongan gaji/upah. Tidak jarang juga banyak yang berhenti bekerja karena hal tersebut.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, berdasarkan gejala – gejala yang muncul adanya suatu ketertarikan untuk mengangkat hal ini menjadi permasalahan sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul “Diskriminasi Buruh Perempuan Pabrik Tempe Di Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.” Berdasarkan uraian diatas ditentukan beberapa pertanyaan penelitian, pertama apa jenis dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap buruh perempuan yang bekerja di pabrik?. Kedua, bagaimana tindakan buruh perempuan terhadap diskriminasi yang dialaminya?.

KERANGKA TEORI

Bagian ini menjelaskan teori tipe diskriminasi dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya diskriminasi. Menurut Diskriminasi adalah perilaku yang diarahkan pada seseorang yang didasarkan semata-mata pada keanggotaan kelompok yang dimilikinya. Ada dua tipe diskriminasi (Liliweri, 2005): Pertama, diskriminasi langsung yaitu tindakan membatasi suatu wilayah tertentu seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum dan semacamnya dan juga terjadi manakala pengambil keputusan diarahkan oleh prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu. Kedua, diskriminasi tidak langsung melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang menghalangi kelompok masyarakat tertentu untuk berhubungan secara bebas yang mana aturan dan prosedur yang mereka jalani mengandung bias diskriminasi yang tidak tampak dan mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas dan kelompok masyarakat tertentu (Cotton, 1988; Marnisah, 2017; Robinson & Wunnava, 1989).

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya akan untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokrasi (Mihailà, 2016; Mukhopadhyay, 2012).

Diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat biasanya diskriminasi individu dan diskriminasi institusi. Diskriminasi individu adalah tindakan seorang pelaku yang berprasangka. Diskriminasi institusi merupakan diskriminasi yang tidak ada hubungannya dengan prasangka individu melainkan dampak kebijaksanaan atau praktik berbagai institusi dalam masyarakat (Banjarani & Andreas, 2019; Sihombing, 2016).

Dalam lintasan sejarah, setiap kelompok masyarakat mempunyai konsepsi ideologis tentang jenis kelamin. Di beberapa kelompok masyarakat, jenis kelamin digunakan sebagai kriteria yang penting dalam pembagian kerja. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut membagi peran, tugas dan kerja berdasarkan jenis kelamin, meskipun sebagian di antaranya ada yang dipandang cocok dan wajar untuk dilakukan oleh kedua jenis kelamin. Pembagian tersebut adalah awal mula dari munculnya diskriminasi (Banjarani & Andreas, 2019; Wijayanti, 2013).

Adapun faktor yang mempengaruhi diskriminasi gender antara lain, petama, Marginalisasi, dapat diartikan sebagai proses penyingkiran perempuan dalam pekerjaan yang mengakibatkan kemiskinan. Sebagaimana dikutip oleh Saptari menurut Alison Scott, seorang ahli sosiologi Inggris melihat berbagai bentuk marginalisasi dalam empat bentuk yaitu: (1). Proses pengucilan, perempuan dikucilkan dari kerja upahan atau jenis kerja tertentu,

(2) Proses pergeseran perempuan ke pinggiran (margins) dari pasar tenaga kerja, berupa kecenderungan bekerja pada jenis pekerjaan yang memiliki hidup yang tidak stabil, upahnya rendah, dinilai tidak atau kurang terampil. Proses feminisasi atau segregasi, pemusatan perempuan pada jenis pekerjaan tertentu (feminisasi buruhan), atau pemisahan yang semata-mata dilakukan oleh perempuan saja atau laki-laki saja. (4) Proses ketimpangan ekonomi yang mulai meningkat yang merujuk di antaranya perbedaan upah. Kedua adalah Subordinasi adalah suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional menjadikan perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin, dan ini berakibat pada munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang penting (Jodkowska, 2013; Robinson & Wunnava, 1989).

Ketiga adalah stereotipe mempunyai arti pemberian citra baku atau label/cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Stereotipe umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan kelompok atas kelompok lainnya. Stereotipe juga menunjukkan adanya hubungan kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Stereotipe negatif juga dapat dilakukan atas dasar anggapan gender. Namun seringkali pelabelan negatif ditimpakan kepada perempuan seperti perempuan yang pulang larut malam adalah pelacur, jalang dan berbagai sebutan buruk lainnya (Jang, Lee, & Lee, 2019; Rosida & Rejeki, 2017).

Selanjutnya adalah kekerasan gender yang diakibatkan ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat sering merugikan jenis kelamin tertentu. Umumnya terhadap fisik dan integritas mental kaum perempuan. Terakhir adalah beban kerja. Peran gender perempuan dianggap satu-satunya pengelola dan pemelihara yang tepat dalam segala urusan rumah tangga (domestik) sehingga menimbulkan beban kerja yang berkepanjangan yang harus ditanggungnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya segala urusan domestik tersebut (Härdle & Simar, 2013; Marnisah, 2017; Nguyen, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan jenis penelitian kualitatif ini berusaha memahami secara mendalam diskriminasi buruh perempuan di Pabrik pembuatan tempe Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Strategi penelitian ini adalah studi kasus dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu dan

peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditetapkan (Creswell, 2003). Lokasi dalam penelitian ini adalah Kelurahan Timbangan tepatnya di lorong Tamyis. Lorong Tamyis merupakan salah satu lorong di Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive (Sengaja) yaitu orang yang berprofesi sebagai pemilik pabrik dan orang yang bekerja/buruh. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi non partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu yang pertama peneliti mulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh pengalamannya yang kedua penelitian kemudian memaknakan pernyataan (dalam wawancara) tentang orang memahami topik, rincian pernyataan-pernyataan tersebut dan perlakukan setiap pernyataan memiliki nilai yang setara serta kembangan rincian tersebut dengan tidak melakukan pengulangan atau tumpang tindih yang ketiga pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan kedalam unit- unit tersebut dan menuliskan sebuah penjelasan teks tentang pengalamannya, termasuk contohnya secara seksama yang keempat peneliti kemudian merefleksikan pemikirannya dan menggunakan variasi imajinasi atau deskripsi srtuktual mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan melalui perspektif yang divergen, mempertahankan kerangka rujukan atas gejala dan mengkonstruksikan bagaimana gejala tersebut dialami yang kelima peneliti kemudian mengkonstuksikan seluruh penjelasannya tentang makna dan esensi pengalamannya yang keenam proses tersebut merupakan langkah awal penelitian mengungkapkan pengalamannya dan kemudian diikuti pengalaman seluruh partisipan (Sugiyono, 2014). Kemudian teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Sudjana, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis diskriminasi

Kurangnya perhatian dan pengawasan pemerintah terhadap para buruh perempuan sering kali memicu terjadinya diskriminasi yang dialami oleh para buruh perempuan (Banjarani & Andreas, 2019; Devi & Pratami, 2018). Ini bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi ataupun sanksi yang tegas terhadap orang-orang yang melakukan praktek- praktek diskriminasi terhadap para buruh perempuan ini. Dari hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan

terdapat beberapa praktek diskriminasi yang dialami oleh buruh perempuan yaitu perbedaan upah antara buruh perempuan dan buruh laki-laki, tidak adanya kebijakan yang dibuat pihak pabrik tentang cuti hamil dan melahirkan. Belum lagi permasalahan tentang pengelolaan dan pemeliharaan urusan rumah tangga yang mereka (buruh perempuan) juga yang harus mengurusnya, karena pihak pabrik mempunyai anggapan bahwa buruh perempuan lebih cakap dalam urusan itu ketimbang buruh laki-laki. Meskipun telah terjadi penambahan beban kerja pada buruh perempuan yang bekerja dipabrik tersebut tidak membuat upah/gaji yang mereka terima setara dengan buruh laki-laki.

Dari hasil temuan dilapangan dapat dilihat bahwa jenis diskriminasi yang dialami oleh buruh perempuan yang bekerja di pabrik pembuatan tempe kelurahan Timbangan adalah diskriminasi tidak langsung (Mihàilà, 2016; Mukhopadhyay, 2012). Baik itu diskriminasi upah/gaji, cuti hamil dan melahirkan maupun permasalahan mengenai pengelolaan dan pemeliharaan urusan rumah tangga, semua hal tersebut dikarenakan kebijakan-kebijakan yang ada di pabrik tersebut.

Berdasarkan temuan dilapangan juga dapat dikatakan bahwa buruh perempuan yang bekerja di pabrik pemuatan tempe kelurahan Timbangan mengalami tiga jenis diskriminasi: yang pertama diskriminasi upah/gaji, terdapat perbedaan upah/gaji antara buruh laki-laki dan buruh perempuan. Yang kedua diskriminasi perbedaan biologis di pabrik tempe kelurahan Timbangan. Dan yang ketiga pengelolaan dan pengurusan urusan rumah tangga yang dilimpahkan oleh pihak pabrik kepada buruh perempuan tanpa adanya penambahan upah/gaji dari pihak pabrik. Dari ketiga diskriminasi yang dialami buruh oleh buruh perempuan yang bekerja di pabrik pembuatan tempe merupakan diskriminasi tidak langsung yang dilakukan oleh pemilik pabrik dengan adanya kebijakan-kebijakan yang memberatkan buruh perempuan yang bekerja di pabrik tersebut. Ataupun tidak adanya kebijakan yang seharusnya ada seperti cuti hamil dan melahirkan menilai dari aspek kebutuhan buruh perempuan yang tidak dimiliki oleh buruh laki-laki.

Faktor penyebab terjadinya diskriminasi yang dialami buruh perempuan

Dalam penelitian yang peneliti lakukan di pabrik pembuatan tempe kelurahan Timbangan, peneliti menemukan ada tiga jenis diskriminasi yang dialami oleh buruh perempuan yang bekerja di pabrik tersebut. Yang pertama diskriminasi upah/gaji karena , yang kedua diskriminasi tidak adanya cuti hamil dan melahirkan di pabrik tersebut dan yang ketiga penambahan beban kerja terhadap buruh perempuan oleh pemilik pabrik. Dari ketiga diskriminasi yang terjadi di pabrik tempe kelurahan Timbangan terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga terjadinya diskriminasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat dikatakan bahwa faktor terjadinya diskriminasi buruh perempuan yang bekerja di pabrik pembuatan tempe kelurahan Timbangan yang pertama faktor kekeluargaan, yaitu adanya hubungan keluarga antara buruh laki-laki dan pemilik pabrik. Seharusnya buruh perempuan dan buruh laki-laki mempunyai hak yang sama dalam pekerjaan seperti penjelasan yang ada didalam undang-undang no 13 tahun 2003 pasal 1 tentang ketenagakerjaan, tidak dibenarkan adanya perbedaan upah/gaji antara buruh perempuan dan buruh laki-laki karena alasan buruh laki-laki masih ada hubungan keluarga. Yang kedua faktor perbedaan biologis, yaitu perbedaan antara buruh laki-laki dan buruh perempuan dalam hal ini tidak adanya kebijakan cuti hamil, melahirkan, dan haid untuk buruh perempuan. Seperti yang telah diketahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kebutuhan yang berbeda, seharusnya buruh perempuan mendapatkan perhatian khusus dari pihak pabrik terkait permasalahan biologis ini (Banjarani & Andreas, 2019; Sihombing, 2016). Dan yang ketiga faktor beban kerja, yaitu penambahan beban kerja yang dialami oleh buruh perempuan. Seperti yang telah disepakati antara buruh perempuan dan pemilik pabrik sebelum buruh perempuan bekerja disana, mereka hanya bertugas untuk membuat tempe dimulai dari persiapan sampai pembungkusan, tidak ada kesepakatan antara buruh perempuan dan wanita untuk membersihkan alat-alat dalam pembuatan tempe. Sekalipun pihak pabrik menambahkan tugas untuk buruh perempuan yang bekerja maka buruh perempuan berhak menerima upah/gaji tambahan.

Upaya buruh perempuan dalam menanggulangi diskriminasi yang dialaminya

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, telah terjadi praktek diskriminasi yang dilakukan pihak pabrik terhadap buruh perempuan yang bekerja disana yaitu yang pertama upah/gaji yang berbeda antara buruh perempuan dan buruh laki-laki, yang kedua tidak adanya kebijakan yang dibuat pihak pabrik terkait masalah cuti hamil, melahirkan, dan haid, yang ketiga penambahan beban kerja yang dilakukan oleh pemilik pabrik.

Berbagai upaya/tindakan telah dilakukan oleh buruh perempuan untuk mendapatkan haknya, mulai dari bertukar pendapat dengan sesama rekannya dalam hal diskriminasi yang mereka alami, pemilik pabrik tempat mereka bekerja. Akan tetapi pihak pabrik sepertinya sudah terbiasa dengan hal ini. Pemerintah telah mengatur dalam undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar buruh, dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Dengan adanya undang-undang tersebut seharusnya buruh perempuan mengetahui dan melaporkan kepada

pihak yang berwajib bahwa mereka telah di diskriminasi selama mereka bekerja di pabrik. Karena alasan takut dan tidak tahu harus melaporkan kemana menjadikan mereka mau tidak mau harus menanggung perlakuan yang diskriminatif dari pihak parik tempat mereka bekerja.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dapat dilihat bahwa buruh perempuan yang bekerja di pabrik tempe kelurahan Timbangan telah melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi diskriminasi yang di alaminya. Mereka melakukan protes kepada pihak pabrik baik secara langsung maupun hanya sekedar menyindir saja. Selain itu mereka bertukar pendapat dengan buruh perempuan lain yang sama-sama mengalami diskriminasi di pabrik tempe tersebut. Tidak ada upaya dari buruh perempuan untuk melaporkan diskriminasi yang mereka alami kepada pihak berwajib, hal ini dikarenakan buruh perempuan tidak tahu harus melaporkan kemana dan takut dipecat/diberhentikan dari pekerjaan yang sekarang mereka jalani karena menurut mereka (buruh perempuan) akan susah mencari pekerjaan yang lain lagi jika mereka sampai diberhentikan (Banjarani & Andreas, 2019; Sihombing, 2016). Mereka hanya menerima perlakuan diskriminatif dari pihak pabrik dengan harapan akan lebih baik nantinya.

KESIMPULAN

Pada bagian akhir dari artikel ini adalah berupa kesimpulan-kesimpulan yang merupakan intisari dari temuan penelitian yang telah diperoleh. Ada beberapa jenis diskriminasi yang dialami oleh buruh perempuan yang bekerja di pabrik pembuatan tempe kelurahan Timbangan: yang pertama diskriminasi upah/gaji, yang kedua diskriminasi perbedaan biologis di pabrik tempe kelurahan Timbangan, dan yang ketiga pengelolaan dan pengurusan urusan rumah tangga yang dilimpahkan oleh pihak pabrik kepada buruh perempuan tanpa adanya penambahan upah/gaji dari pihak pabrik.

Faktor terjadinya diskriminasi buruh perempuan yang bekerja di pabrik pembuatan tempe kelurahan Timbangan yang pertama faktor kekeluargaan, yaitu adanya hubungan keluarga antara buruh laki-laki dan pemilik pabrik. Buruh perempuan dan buruh laki-laki mempunyai hak yang sama dalam pekerjaan seperti penjelasan yang ada didalam undang- undang no 13 tahun 2003 pasal 1 tentang ketenagakerjaan, tidak dibenarkan adanya perbedaan upah/gaji antara buruh perempuan dan buruh laki-laki karena alasan buruh laki-laki masih ada hubungan keluarga. Yang kedua faktor tidak adanya cuti hamil dan melahirkan, yaitu perbedaan antara buruh laki-laki dan buruh perempuan dalam hal ini tidak adanya kebijakan cuti hamil, melahirkan, dan haid untuk buruh perempuan. Seperti yang telah diketahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Dan yang ketiga faktor beban kerja, yaitu penambahan beban kerja yang dialami oleh buruh perempuan. Seperti yang telah disepakati antara buruh perempuan dan

pemilik pabrik sebelum buruh perempuan bekerja disana, mereka hanya bertugas untuk membuat tempe dimulai dari persiapan sampai pembungkusan, tidak ada kesepakatan antara buruh perempuan dan wanita untuk membersihkan alat-alat dalam pembuatan tempe. Sekalipun pihak pabrik menambahkan tugas untuk buruh perempuan yang bekerja maka buruh perempuan berhak menerima upah/gaji tambahan.

Buruh perempuan yang bekerja di pabrik pembuatan tempe kelurahan Timbangan telah melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi diskriminasi yang di alaminya. Mereka melakukan protes kepada pihak pabrik baik secara langsung maupun hanya sekedar menyindir saja. Selain itu mereka bertukar pendapat dengan buruh perempuan lain yang sama-sama mengalami diskriminasi di pabrik tempe tersebut serta mencari solusi terbaik terkait permasalahan yang mereka alami. Tidak ada upaya dari buruh perempuan untuk melaporkan diskriminasi yang mereka alami kepada pihak berwajib, hal ini dikarenakan buruh perempuan tidak tahu harus melaporkan kemana dan takut dipecat/diberhentikan dari pekerjaan yang sekarang mereka jalani karena menurut mereka (buruh perempuan) akan susah mencari pekerjaan yang lain lagi jika mereka sampai diberhentikan. Mereka hanya menerima perlakuan diskriminatif dari pihak pabrik dengan harapan akan lebih baik nantinya.

Implikasi praktis dari hasil studi ini adalah bahwa buruh perempuan harus lebih cermat dalam pekerjaan yang dijalannya. Bila ada yang dirasa tidak adil selama dia (buruh perempuan) bekerja di pabrik atau dimanapun tempatnya bekerja, harus cepat melaporkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini DISNAKER atau serikat buruh agar perlakuan tidak adil yang dialaminya tidak sampai berlarut-larut. Karena setiap rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan. Hal ini tertuang dalam sila kelima Pancasila.

Tidak semua buruh perempuan yang bekerja di Indonesia tahu harus melapor kemana jika mereka mengalami perlakuan tidak adil ataupun diskriminasi. Buruh perempuan di pabrik pembuatan tempe Timbangan contohnya, mereka tidak tahu harus melapor kemana saat mereka mengalami perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak pabrik tempat mereka bekerja. Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang pekerjaan ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan terjadinya diskriminasi tersebut. Diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib buruh yang bekerja di Indonesia. Terlebih lagi buruh perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Banjarani, D. R., & Andreas, R. (2019). Perlindungan dan Akses Hak Pekerja Wanita di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO. *Jurnal HAM*, 10(1), 115.

- <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.115-126>
- Cameron, L., Suarez, D. C., & Rowell, W. (2019). Female Labour Force Participation in Indonesia: Why Has it Stalled? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(2), 157–192. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1530727>
- Cotton, J. (1988). Discrimination and Favoritism in the U.S. Labor Market: The Cost to a Wage Earner of Being Female and Black and the Benefit of Being Male and White. *American Journal of Economics and Sociology*, 47(1), 15–28. <https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.1988.tb02001.x>
- Creswell, J. W. (2003). Research design Qualitative quantitative and mixed methods approaches. *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches*. <https://doi.org/10.3109/08941939.2012.723954>
- Devi, O. :, & Pratami, R. (2018). Analisis Kebijakan Perlindungan Buruh Perempuan : Studi Pemenuhan Hak-Hak Kerja Perempuan Pada Industri Garmen Di Kabupaten Semarang. *Journal of Politic and Government Studies* (Vol. 8). Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/22624>
- Härdle, W. K., & Simar, L. (2013). *Applied multivariate statistical analysis*. *Applied Multivariate Statistical Analysis* (5th Edn). New Jersey: Prentice-Hall, Inc. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-17229-8>
- Jang, J. Y., Lee, S., & Lee, B. (2019). Quantification of gender representation bias in commercial films based on image analysis. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 3(CSCW). <https://doi.org/10.1145/3359300>
- Jodkowska, L. (2013). Forms of female discrimination in the german labour market | Formy dyskryminacji kobiet na rynku pracy w Niemczech. *Ekonomista*, (6), 813–830.
- Jones, G. (1986). Differentials in female labour force participation rates in Indonesia: reflection of economic needs and opportunities, culture or bad data? *Majalah Demografi Indonesia*, (26), 1–28.
- Liliweri, A. (2005). *Prasangka dan Konflik. Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: LKIS.
- Magnani, E., & Rammohan, A. (2009). Ageing and the family in Indonesia: An exploration of the effect of elderly care-giving on female labor supply. *Journal of Income Distribution*, 18(3–4), 110–130.
- Marnisah, L. (2017). Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Tenaga Kerja Perempuan terhadap terjadinya Diskriminasi Upah pada Sektor Industri Sedang di Kota Palembang. *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak* (Vol. 12). Retrieved from <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/1479>
- Mihailà, R. (2016). Female labor force participation and gender wage

- discrimination. *Journal of Research in Gender Studies*, 6(1), 262–268. <https://doi.org/10.22381/JRGS6120169>
- Mukhopadhyay, S. (2012). The effects of the 1978 pregnancy discrimination act on female labor supply. *International Economic Review*, 53(4), 1133–1153. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2354.2012.00714.x>
- Nguyen, G. (2019). Sibling-sex composition, childbearing and female labour market outcomes in Indonesia. *Journal of Population Research*, 36(1), 13–34. <https://doi.org/10.1007/s12546-018-9210-2>
- Platt, M. (2018). Migration, Moralities and Moratoriums: Female Labour Migrants and the Tensions of Protectionism in Indonesia. *Asian Studies Review*, 42(1), 89–106. <https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1408571>
- Putri, R. A., . I., & Pratiwi, A. (2019). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DISKRIMINASI KESEMPATAN MENDAPATKAN UPAH BAGI TENAGA KERJA PEREMPUAN DI INDONESIA. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 259–278. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.20>
- Robinson, M. D., & Wunnava, P. V. (1989). Measuring direct discrimination in labor markets using a frontier approach: evidence from CPS female earnings data. *Southern Economic Journal*, 56(1), 212–218. <https://doi.org/10.2307/1059067>
- Rosida, I., & Rejeki, L. (2017). Woman in Patriarchal Culture: Gender Discrimination and Intersectionality Portrayed in Bob Darling by Carolyn Cooke. *Insaniyat: Journal of Islam and Humanities*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/insaniyat.v1i2.4345>
- Sihombing, U. P. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan Di Tempat Kerja. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 2(1), 66–78. <https://doi.org/10.35814/SELISIK.V2I1.640>
- Sudjana, N. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdikarya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijayanti, D. M. (2013). BELENGGU KEMISKINAN BURUH PEREMPUAN PABRIK ROKOK. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/komunitas.v2i2.2278>